

## HOLDING COMPANY BUMN PANGAN, SWASEMBADA PANGAN DAN KESEJAHTERAAN PETANI

Oleh :

- 1) Sutrisno, 2) Meirinaldi,  
1),2) Dosen Pascasarjana Universitas Borobudur Jakarta  
1) Email: [Sutrisno.sutrisno1952@gmail.com](mailto:Sutrisno.sutrisno1952@gmail.com)  
2) Email : [meirinaldi.2505@gmail.com](mailto:meirinaldi.2505@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*The aims of the article to analysis and know, how the role of agriculture sectors to the result of the independency food product or Swasembada Pangan in Indonesia. The role of Swasembada Pangan (the independency food product ) to the over come of the lack of the demand and supply/Indonesia food products. The result of the Indonesia Demography Census by Central Statistic Bureau the end of the years 2020, total of amount population is the 270,2 million people.*

*The amount 270,2 million people have the basic need must be to overcome this problem of need of amount food agriculture products such as: rices, cow or buffalo flesh, kedelai, sugarcane, bawang putih. Therefore how to support the independency food products is very important to minimize the import food products and also to imports decrease, and the decrease foreing exchange risk. The other hand of the aims of the article to how to increase the peasant welfare.*

*The role of gouverment policy to support the Swasembada Pangan (the independency food product ) such as to build The Holding Food State Company ( BUMN ) in oder one policy food product will be efficiency and optimum sufficiency.*

**Keywords:** *The Role of Swasembada Pangan, The Holding Food State Company (BUMN), Foods Products Import such as rices, cow or buffalo flesh, sugarcane, bawang putih (onion white) , kedelai, the peasant welfare, peasant welfare.*

### **PENDAHULUAN**

Berdasarkan hasil Sensus Ekonomi Nasional (SUSENAS) jumlah penduduk Indonesia pada akhir tahun 2020 berjumlah 270,2 juta orang, dengan jumlah penduduk tersebut berdasarkan pendekatan dari perspektif ekonomi dapat dijadikan titik tolak untuk perencanaan atau prediksi makro ekonomi meliputi antara lain terhadap kebutuhan dasar manusia yang harus dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan dasar (*basic needs*) tersebut meliputi : pangan, sandang, papan/perumahan, kesehatan, dan

pendidikan. Dari kebutuhan dasar tersebut dapat dijadikan titik tolak untuk membuat perencanaan nasional untuk merespon kebutuhan dasar penduduknya.

Terkait dengan masalah kebutuhan dasar penduduk Indonesia, penulis akan membahas tentang kebutuhan pangan yang harus dipersiapkan/diperhitungkan oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*) khususnya pemerintah. Kebutuhan pokok pangan yang akan kami telaah dalam karya tulis ilmiah adalah sebagai pembahasan yang lebih khusus atau mengelaborasi tulisan saya yang dimuat dalam jurnal Ekonomi Program

Pascasarjana Universitas Borobudur Jakarta volume 22 Nomor 2 Juni 2020 halaman ISSN 1411 – 3953 judul “Covid 19 dan Arah Ekonomi Indonesia”; pada point *pertama*, pertanian/tanaman pangan seperti beras, kedelai, gula pasir, daging sapi/kerbau, bawang merah, bawang putih, bawang bombai, berbagai jenis buah-buahan/ hortikultura seperti jeruk, apel, anggur dan lain-lain, bagaimana strategi untuk dapat dipenuhi dari dalam negeri. Jika karena gagal panen yang disebabkan oleh hama tanaman, kemarau panjang atau banjir, baru impor untuk memenuhi kekurangan stock kebutuhan pangan. Kebutuhan pangan yang merupakan produk sector pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan merupakan masalah pokok dalam mencapai swasembada dan ketahanan pangan.

Dalam kaitan dengan judul artikel ini yakni “  *Holding Company BUMN Pangan, Swasembada Pangan dan Kesejahteraan Petani*” penulis hendak menelaah bagaimana kebijakan pemerintah untuk mencapai swasembada pangan dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan penduduk dengan mengurangi impor serta meningkatkan kesejahteraan petani sebagai subyek dalam menghasilkan/ memproduksi tanaman pangan. Dalam menelaah kebijakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat dari tahun ke tahun karena meningkatnya jumlah penduduk, maka penulis akan mendalami tentang strategi dan kebijakan pemerintah tersebut dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduk.

Masalah swasembada pangan adalah menjadi persoalan yang penting dan

strategis untuk mengurangi ketergantungan pangan terhadap impor pangan, sekaligus mengandung dimensi social dalam rangka menekan angka kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan petani yang hidupnya dari sector pertanian. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani, dengan meningkatkan ketahanan pangan menuju swasembada pangan, dengan antara lain mengurangi ketergantungan impor pangan. Dengan meningkatkan produksi hasil tanaman pangan mengandung dimensi, peningkatan kesejahteraan petani, mengurangi pengeluaran devisa, menguatkan / menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap US\$, menjaga stabilitas politik dan gejolak social karena kelangkaan pangan sebagai kebutuhan pokok rakyat.

Salah satu langkah pemerintah untuk menjamin ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup, kualitas dan harga yang terjangkau oleh sebagian besar penduduk, antara lain membangun  *Food Estate*  di Kalimantan Tengah dengan luas areal 164.598 Hektare yang terdiri dari pengembangan/intensifikasi lahan yang telah ada 85.456.Ha dan ekstensifikasi/pembuatan lahan baru seluas 79.142. Ha.  *Food Estate*  di Sumbawa Tengah Propinsi Nusa Tenggara Timur juga dibangun 10.000 Ha yang terdiri dari 5.600 Ha tanaman padi dan 4.400 Ha tanaman jagung.

Tujuan pembentukan Holding Company BUMN Pangan adalah untuk merupakan upaya/langkah pemerintah dalam mendorong penguatan ketahanan pangan, memastikan ketersediaan pangan domestic, dan mengurangi secara bertahap mengurangi ketergantungan impor pangan, demikian penjelasan Wakil Menteri Badan Usaha Milik

Negara (BUMN) Pahala N Mansury (Republika 28.01.2021 ).

Dibentuknya Holding Company BUMN Pangan agar kebijakan pangan lebih terkonsentrasi, terpadu dan terkoordinir dalam satu kebijakan pangan terintegrasi dari hulu ke hilir sehingga terbangun rantai nilai dan suplai (*supply and value chain* ) yang baik serta dapat dihilangkan distorsi dan hambatan pemenuhan kebutuhan pangan nasional.

## **BAHAN DAN METHODE**

### **Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan ini dengan mengambil judul “ *Holding Company* BUMN Pangan, Swasembada Pangan dan Kesejahteraan Petani “ adalah untuk mengetahui dampak dari kelangkaan ketersediaan pangan bagi perekonomian nasional, khususnya terhadap kesejahteraan petani, stabilitas harga pokok pangan, serta kebijakan pemerintah dalam bidang pangan khususnya dalam memenuhi ketersediaan pokok pangan dengan harga yang terjangkau.

Salah satu yang akan dibahas adalah manfaat dari pembentukan *Holding Company* BUMN Pangan bagi stabilitas pasokan pangan, ketersediaan pemenuhan kebutuhan pangan dan harga pangan yang terjangkau bagi penduduk.

### **Methode Penulisan**

Methode penulisan paper ini berdasarkan sumber data sekunder yang diperoleh dari data Pustaka, buku-buku ilmiah, jurnal ilmiah dan sumber lain yang kredibel.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam uraian, penjelasan terkait dengan materi pokok bahasan “*Holding Company* BUMN Pangan, Swasembada Pangan dan Kesejahteraan Petani” kami sampaikan gambaran singkat tentang jumlah penduduk, jumlah penduduk yang hidup dari sector pertanian meliputi jumlah petani, luas lahan pertanian, jumlah produksi/hasil pertanian/peternakan meliputi beras, kedelai, daging sapi, gula pasir, bawang putih, jumlah impor pangan.

Selain gambaran tentang jumlah/Hasil produksi pertanian/peternakan, disampaikan juga pokok-pokok kebijakan pemerintah dalam mengatasi kebutuhan pangan penduduk, serta rencana pembentukan *Holding Company* BUMN Pangan.

Dalam penulisan ini kami sampaikan data mengenai pertanian meliputi jenis produk pertanian yang menjadi pokok bahasan dalam mencapai swasembada dan ketahanan pangan, luas areal lahan pertanian, jumlah petani, jumlah penduduk Indonesia secara nasional. Jumlah penduduk Indonesia sesuai hasil sensus social ekonomi Nasional (Susenas) sebanyak 270,2 juta orang.

Dari jumlah penduduk Indonesia tersebut terdapat jumlah petani 33.487.806. orang, yang terdiri atas 25.436.478 orang berjenis kelamin laki-laki, 8.051.328. perempuan. Dari jumlah petani 33.487.806. orang; yang menjadi Rumah Tangga Usaha Petani (RTUP) sebanyak 27.682.117. orang, dan dari RTUP tersebut sebagai RTUP padi sebanyak 15.115.108. orang. **Berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 2020 sejumlah 270,2 juta orang, penduduk yang hidup dari mata pencaharian sector**

**pertanian sebanyak 33.487.806 orang atau 12,39% dari populasi penduduk Indonesia.**

Dari data pertanian Indonesia, luas lahan pertanian dari tahun ke tahun terus mengalami penyusutan/pengurangan luas areal/lahan pertanian, yang disebabkan oleh penggunaan lahan pertanian untuk pemukiman, industri, perkantoran dan lain lain

Data luas lahan pertanian dari tahun 2014 lahan sawah sebanyak 8,11 juta ha, menyusut menjadi 7,46 ha lahan sawah pada tahun 2020 berarti luas lahan pertanian menyusut/berkurang 650.000 Ha, meskipun pemerintah mencetak lahan sawah baru pada 2019 seluas 6.000 ha dan 2020 seluas 10.000 ha. **Penguasaan lahan sawah adalah sebanyak Rumah Tangga Usaha Petani (RTUP) 27.222.773, dari sejumlah RTUP 27.222.773, adalah merupakan Rumah Tangga petani gurem sebanyak 15.809.398.**

Sehubungan dengan pandemi Covid 19 yang melanda keseluruhan dunia, dan Indonesia mulai terdeteksi terjadi penularan wabah/pademi Covid 19 yang direlease/diumumkan resmi oleh pemerintah pada awal Maret 2020, berdasarkan data yang diumumkan oleh Komite Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) posisi pada 4 Januari 2022 jumlah positif terpapar Covid 19 sebanyak 4.263.732 orang, dinyatakan sembuh 4.114.969 orang dan meninggal dunia 144.105. orang.

Dampak ekonomi akibat pandemic Covid 19 menimbulkan pada jasa pariwisata yang berdampak pada usaha jasa transportasi (darat, laut dan udara), jasa hotel/penginapan, restaurant, tempat

tujuan wisata, juga mall/pertokoan/retail. Untuk pelaku usaha UMKM sebanyak 64,4 juta yang menyerap tenaga kerja 117 juta orang, akibat pandemi Covid 19 menimbulkan hampir 35 juta pelaku usaha gulung tikar/tutup usaha. Untuk sector ekonomi yang justru mengalami pertumbuhan adalah bidang jasa keuangan & asuransi dari 2019 sebesar 6,61%, 2020 menjadi 3,25%.

Untuk informatika & komunikasi dari 2019 7,42%, 2020 menjadi 10,58% , jasa kesehatan & kegiatan social dari 2019 8,69%, 2020 menjadi 11,6%. Sedangkan untuk sector pertanian, perikanan, kehutanan meskipun pertumbuhan mengalami penurunan tetapi tetap tumbuh positif dari 2019 tumbuh 3,61%, pada 2020 hanya tumbuh 1,75%

Dampak ekonomi lainnya adalah meningkatnya angka kemiskinan dari posisi September 2019 sebanyak 24,77 juta orang, pada September 2020 menjadi 27,55 juta orang miskin, angka pengangguran dari September 2019 sebanyak 7,19 juta orang, pada September 2020 menjadi 9,77 juta orang. Jumlah orang miskin pada September 2020 sebanyak 27,55 juta orang (10,19% jumlah penduduk) terdiri atas 15,51 juta penduduk miskin di desa, sedangkan penduduk miskin di kota sebanyak 12,04 juta, dari jumlah penduduk miskin di desa adalah mayoritas adalah petani, dan penduduk miskin kota yang sebagian besar tidak memiliki keahlian/ketrampilan untuk bisa bersaing hidup di perkotaan, dan penduduk miskin kota juga awalnya berasal dari orang desa yang migrasi ke kota tanpa dibekali keahlian/ketrampilan untuk hidup dikota.

Peran/kontribusi sector pertanian terhadap Produk Domestik Bruto Nasional (PDB) terus mengalami penurunan, dari 13,93% pada tahun 2010, turun menjadi 12,72% pada 2019. (Sumber data: BPS )

Data Ketersediaan Pangan ( dalam Ton ) tahun 2020

Uraian	Stok akhir	Estimasi Produksi	Estimasi Dlm Negeri	Estimasi Impor	Estimasi Kebun tebu	Neraca Maret 2021
Beras	6.74 9.30 5	8.26 3.87 9	-	15.01 3.183	7.480 .042	7.53 3.14 2
Jagung	1.30 4.91 5	6.49 5.18 4	-	7.800 .099	4.812 .382	2.98 7.71 8
Kedelai	411. 975	28.7 54	650. 000	1.090 .729	778.1 80	312. 549
Gula Pasir	804. 685	11.8 37	646. 944	1.463 .466	688.4 33	775. 033
Bawang Putih	135. 031	14.5 06	42.0 00	191.5 38	144.4 00	47.1 38
Daging Sapi	47.8 36	77.4 49	71.2 50	196.5 35	175.4 12	21.1 23

Sumber : Kementerian Pertanian.

Data lain menunjukkan bahwa kebutuhan kedelai per tahun 2,8 juta ton, sedangkan produksi/hasil panen kedelai pertahun sekitar 300.000 s/d 400.000 ton pertahun. Dengan mengembangkan Kawasan khusus tanaman kedelai 1 juta ha, masih diperlukan impor kedelai sebanyak 2,5 juta ton pertahun. Untuk data gula produksi 2,1 juta ton sedangkan kebutuhan 2,8 juta ton, defisit gula konsumsi 600.000 ton, belum termasuk gula untuk industri makanan & minuman. Untuk mengurangi defisit kebutuhan gula tersebut pemerintah dengan meningkatkan produksi gula, dengan melakukan bongkar/rawat kebun

tebu 75.000 ha, buka areal lahan kebun tebu 50.000 ha, sehingga rawat rata-rata kebun tebu berjumlah 125.000. ha.

Kementerian Pertanian dengan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi produksi gula ditargetkan bertambah 676.000 ton gula. Tetapi dengan dibukanya kran impor gula refinery untuk gula industri minuman dan makanan, yang juga dijual dipasar gula konsumsi, telah menekan keuntungan gula konsumsi yang sebagian besar dari produksi tebu rakyat, mengingat harga gula impor lebih murah dari gula local. Harga jual gula konsumsi dalam negeri lebih rendah Harga Pokok Produksi Gula konsumsi, sehingga petani tebu gula mengalami kerugian, HPP gula Dalam Negeri Rp.5.000,- hingga Rp.6.000,- per kilogram, sedangkan harga gula impor per kilogram dalam kisaran Rp.4.000,- hingga Rp.4.500,-

**Kementerian Pertanian mentargetkan swasembada gula konsumsi pada tahun 2023, dengan melakukan intensifikasi, melalui peremajaan tanaman tebu pada lahan 75.000 ha di pulau Jawa dan pembukaan lahan tanaman tebu baru/ekstensifikasi seluas 50.000 ha, dengan target produksi gula 15.000. ton per ha. Untuk memenuhi target produksi gula tersebut Kementan menambah 10 unit pabrik gula baru, dengan syarat tiap pabrik gula yang baru harus dengan kapasitas giling tebu minimal 12.000. ton per hari / *Ton Every Days (TED)*.**

Setiap pabrik gula dengan kapasitas giling 12.000. ton /TED harus memiliki luas kebun tebu. Impor gula dalam tahun 2019 sebanyak 4.juta ton, kebutuhan gula nasional 5,9 juta ton yang terdiri gula konsumsi 2,8 juta ton dan untuk gula industri 3,1 juta. Pada tahun 2020 produksi gula 2,2 juta ton, impor

gula sebesar kebutuhan dikurangi produksi dalam negeri, yakni 5,9 juta ton dikurangi 2,2 juta ton, sehingga impor gula minimal 3,1 juta ton, produksi gula konsumsi 2,2 juta ton kebutuhan gula konsumsi 2,8 juta ton, sehingga difisit gula konsumsi 600.000 ton.

Untuk mengatasi defisit gula konsumsi, pemerintah melakukan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi produksi ditargetkan bertambah 676.000 ton gula, impor gula rafinari menyebabkan harga gula petani tebu menjadi tertekan, karena harga gula impor dipasar dalam kisaran Rp.4.000,- hingga Rp.4.500,- per kilogram, sedangkan Harga Pokok Produksi gula produksi Dalam Negeri sebesar Rp.5.000,- sampai Rp.6.000,- per kilogram.

Konsumsi Beras Rata-Rata per orang Desa & Kota (dalam Kilogram/Kg )

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Kota	6,04	6,07	6,02	5,89	5,91
Desa	7,99	7,48	7,37	7,15	7,14

Pengeluaran Konsumsi Beras penduduk Kota & Desa (Rupiah)

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Kota	55.762	52.167	57.850	56.257	57.676
Desa	68.484	65.484	70.609	68.164	69.884

Sumber: Biro Pusat Statistik

Dalam mengatasi kekurangan pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri pemerintah dengan meningkat produksi dan impor. Untuk menjaga ketahanan pangan, pemerintah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan.

Anggaran Ketahanan Pangan (dalam Rp. Triliun )

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai	110,4	100,4	89,5	85,1	80,0

Sumber : Kementerian Pertanian.

Dalam membahas masalah produksi pertanian ada kaitan dengan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian yang dikenal sarana produksi pertanian (Saprotan) meliputi, pupuk, alat alat produksi pertanian antara lain, mesin tractor, mesin giling padi/tebu, bahan kimia penunjang produksi, tenaga/buruh tani, alat transportasi, gudang dan lain lain.

**Kebijakan pemerintah terkait dengan swasembada pangan adalah bagaimana kebutuhan pangan rakyat dapat dipenuhi dengan produksi pangan dalam negeri, namun karena adanya gagal panen yang disebabkan oleh banjir, kekeringan, hama penyakit tanaman; baru dilakukan impor pangan dalam rangka melaksanakan ketahanan pangan, untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam jumlah, harga yang memadai/terjangkau, serta keterjangkauan pengadaannya oleh rakyat.**

Upaya lain untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan pangan dengan program stabilisasi harga pangan, dengan intervensi pasar/*market operation* dengan menjual atau beli salah satu atau beberapa komoditi pangan, juga melakukan subsidi harga maupun suplai pupuk. Dalam kaitan dengan pupuk, jumlah alokasi pupuk bersubsidi pada 2021 sebanyak 9.041.475 ton dan 1.500.000 liter pupuk organic cair.

Alokasi pupuk bersubsidi terdiri: 4.166.669. ton jenis Urea, 640.812 ton SP36, 784.144 ton ZA, 2. 662.000 ton NPK . Yang berhak menerima subsidi pupuk adalah

Kelompok Tani (Klontan) yang terdaftar dalam Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e.RDKK), pada tahun 2020 alokasi pupuk bersubsidi 8,5 juta ton. Alokasi pupuk bersubsidi pada 2021 sebanyak 9 juta ton dan 1,5 juta pupuk organik cair, tahun 2020 sebanyak 8,9 juta ton, dan petani yang berhak dapat pupuk subsidi adalah petani yang sudah terdaftar pada e.RDKK. (Sumber Kementerian Pertanian)

Penyelesaian Holding BUMN Pangan oleh BUMN agar pengelolaan pangan nasional/Dalam Negeri lebih kuat, untuk mendukung ketersediaan pangan harus diintegrasikan dari hulu ke hilir hingga terbangun *value chain*/rantai nilai yang lebih baik, maka dibentuk BUMN Pangan dan kluster Pangan. Dengan Holding Pangan akan terbentuk/memberikan bisnis antar BUMN. BUMN Pangan diharapkan menjadi produsen Pangan kelas dunia, Holding BUMN Pangan akan fokus pada produksi 10 komoditas pangan, yakni beras, jagung, gula, ayam, sapi, kambing, ikan, cabai, bawang merah dan garam.

**PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) ditunjuk sebagai induk Holding BUMN Pangan, anggota Holding adalah: PT. Sang Hyang Seri (Persero), PT. Pertani (Persero), PT. Perinus (Persero), Perum Perindo, PT. PPI (Persero), PT. Berdikari (Persero), PT. Garam (Persero) dan PT. Rajawali Nusantara Indonesia.**

Masing-masing BUMN akan focus berbeda-beda sebagai berikut:

- Produksi beras, jagung, cabai merah, bawang merah oleh PT. Sang Hyang Seri dan PT. Pertani.
- Produksi ayam dan sapi oleh PT. Berdikari
- Produksi ikan oleh Perindo dan Perum Perikanan Indonesia
- Produksi gula oleh PT. Rajawali Nusantara Indonesia
- Produksi garam oleh PT. Garam
- Logistik dan Storage oleh BGR Logistics
- Perdagangan/trading oleh PPI

PT. Rajawali Nusantara Indonesia sebagai induk Badan Usaha Milik Negara kluster pangan ditugaskan menuntaskan proses pembentukan Holding BUMN Pangan. Khusus untuk melakukan revitalisasi pabrik gula, PT. Rajawali Nusantara Indonesia melaksanakan pada tahun 2021, revitalisasi pabrik gula untuk mendorong peningkatan produksi gula berbasis tebu dengan membenahi ketersediaan bahan baku tebu yang siap diolah menjadi kristal gula putih (GKP). Penyiapan tebu dimulai dari konsolidasi lahan perkebunan tebu milik PT. Rajawali Nusantara Indonesia dan PT. Perkebunan Nusantara (Persero) serta Perum Perhutani.

PT. Rajawali Nusantara Indonesia memiliki 7 (tujuh) pabrik gula meliputi PG. Kreet Baru di Malang, PG. Rejo Agung Baru di Madiun, PG. Candi Baru di Sidoarjo, PG. Tersana Baru dan PG. Sindang Laut di Cirebon, PG. Jati Tujuh di Majalengka, serta PG. Subang. Ketujuh pabrik gula milik PT. Rajawali Nusantara Indonesia harus di revitalisasi agar bisa berkontribusi dalam pemenuhan gula nasional, serta harus dapat menghasilkan rendemen tebu yang lebih tinggi agar jumlah gula yang diperoleh lebih

besar. Gula hanya satu dari beberapa komoditas pangan yang harus dibenahi oleh BUMN klaster pangan yang dibentuk menjadi Holding BUMN Pangan. Produksi gula dari PT. Rajawali Nusantara Indonesia pada tahun 2020 sebesar 238.485 ton. (Sumber: Kementerian BUMN)

Manfaat pendirian Holding BUMN Pangan ditinjau dari teori tentang Holding Company BUMN bertujuan antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya saing BUMN (*competitiveness*)
2. Meningkatkan nilai asset BUMN
3. Meningkatkan financial performance untuk memperoleh pembiayaan dari perbankan.
4. Meningkatkan performance bisnis sehingga mampu go internasional

Pembentukan  *Holding*  sebagai bagian dari  *Corporate Parenting Strategy* . Pembentukan Holding BUMN ( *corporate parent* ) adalah upaya pemerintah guna meningkatkan  *value creation*  BUMN.

Konsep pembentukan  *holding*  ini sudut pandang ilmu manajemen pada dasarnya adalah strategi pada level korporasi ( *corporate level strategy* ), perusahaan dari berbagai lini bisnis (dalam konteks  *holding*  BUMN berada dalam industri yang sama) digabungkan dan dibentuk suatu induk perusahaan yang menaungi perusahaan-perusahaan tersebut.

Konsep ini dikenal dengan  *Corporate Parenting Strategy* , dalam  *Corporate Parenting Strategy* , terdapat satu perusahaan yang menjadi perusahaan induk dan terdapat beberapa perusahaan yang memiliki berbagai bisnis utama yang

menjadi anak perusahaan. (Toto Pranoto, 2017)

Menurut penjelasan Direktur Utama PT. Rajawali Nusantara Indonesia selaku Induk dari  *Holding Company BUMN Pangan, Holding Company BUMN Pangan mempunyai tugas/sasaran utama yakni: mendukung ketahanan pangan, inklusivitas petani, peternak dan nelayan, hingga menjadi perusahaan pangan kelas dunia.*

Dalam pelaksanaan dilapangan kebijakan pengelolaan /manajamen pangan, terdapat distorsi, hambatan, dan penyimpangan dari perencanaan, program penanganan masalah pangan. Sebagai contoh masalah beras, harga gabah kering panen (GKP) ditingkat petani pada musim panen tahun 2020/2021 per kilogram pada 26 Februari 2021 dalam kisaran Rp.3.800,- hingga Rp.3.900,- yang seharusnya sesuai ketentuan BULOG sebesar Rp.4.500,- per kg. Harga Gabah Kering Panen (GKP) di kisaran Rp.3.800,- - Rp.3.900,- per kg, jelas merugikan petani, karena masih dibawah Harga Pokok Produksinya, apabila Bulog tidak menaikkan Harga Pembelian Pemerintah petani akan mengalami kerugian.

(Sumber Kementan )

## **PENUTUP**

### **Simpulan:**

1. Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pokok pangan sebagian besar dengan cara mengimpor pangan, untuk beras, dilakukan impor jika target produksi beras tidak tercapai karena musim kemarau panjang, adanya hama tanaman yang mengakibatkan produksi tidak tercapai.

Tanaman pangan lain untuk memenuhi kebutuhan nasional, sedangkan produksi/panen tanaman pangan jauh dari jumlah yang dibutuhkan, maka solusi pemerintah untuk mengatasi kekurangan pangan dengan melakukan impor, jenis pangan yang diimpor tersebut meliputi: kedelai, daging sapi, bawang putih, bawang bombai, gula pasir, jagung, **gandum (100% impor)**, berbagai jenis buah-buahan (hortikultura).

2. Upaya pemerintah untuk mengatasi kekurangan kebutuhan pangan antara lain dengan membuka lahan baru (ekstensifikasi lahan pertanian) dengan membuka lahan baru (*Food Estate*) di Kalimantan Tengah dengan intensifikasi Lahan seluas 85.456. Ha dan ekstensifikasi membuka lahan baru seluas 79.142. Ha, serta di Sumbawa Nusa Tenggara Timur seluas 10.000. Ha untuk padi dan 6.000.Ha untuk jagung. Namun upaya membuka lahan baru seluas 95.142 Ha belum mengcover luas lahan pertanian yang menyusut atau berkurang karena untuk perumahan, kawasan industri seluas 650.000. Ha selama dari tahun 2014 sampai 2020.
3. Untuk mengatasi kekurangan kebutuhan pangan, dan menata ulang manajemen pangan nasional agar lebih efisien dan meningkatkan ketahanan pangan serta menjadi perusahaan pangan kelas dunia, pemerintah membentuk  **Holding BUMN Pangan** dengan melakukan merger 6 BUMN Pangan, menjadi 3 BUMN Pangan dengan PT. Rajawali Nusantara Indonesia sebagai Induk Holding BUMN Pangan. Yang resmi

ditanda tangani pada 2 Desember 2021 di Kementerian BUMN. PT Bhandha Ghara Reksa (Persero) atau BGR Logistik bergabung ke dalam PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia. PT Perikanan Nusantara (Perinus) bergabung ke dalam PT. Perikanan Indonesia (Perindo) dan PT.Pertani masuk ke dalam PT. Sang Hyang Seri

### **Saran**

Struktur ekonomi Indonesia yang didominasi oleh barang-barang impor dalam memenuhi berbagai kebutuhan barang/produk yakni produk/barang kebutuhan pokok pangan, kebutuhan obat-obatan/alat-alat kesehatan/farmasi, barang-barang elektronik, maka karena dominasi impor barang, harga barang-barang menjadi sangat rentan terhadap kenaikan harga/inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga dalam valuta asing dinegara eksportir serta kenaikan harga karena melemahnya mata uang rupiah/ kurs terhadap US\$.

Solusi untuk mengatasi ketergantungan pangan impor adalah dengan cara antara lain:

1. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pemanfaatan lahan pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, peningkatan penelitian dan pengembangan benih/bibit tanaman pangan/perikanan/peternakan yang berkualitas, disertai manajemen pra panen dan pasca panen, perbaikan sistim logistik, distribusi dan pengawasan harga kebutuhan pokok pangan yang melindungi konsumen maupun petani/produsen/peternak/nelayan/penghasil tanaman pangan.

2. Koperasi pertanian seperti Badan Usaha Unit Desa (BUUD), Koperasi Unit Desa (KUD), Pusat Pelayanan Koperasi Pertanian, Pusat Koperasi Unit Desa (PUKUD), tenaga Penyuluh Pertanian (lulusan SPMA), Penyuluh Pertanian Spesialis (Sarjana Pertanian, tenaga /Manajer PUKUD/PPK dari lulusan S1 Pertanian/Peternakan/Perikanan/Ekonomi agar dilakukan rekrutmen/penerimaan kembali serta ditingkatkan kualitasnya sehingga dapat membantu perkembangan sektor pertanian/ tanaman pangan, peternakan, perikanan dan perkebunan penghasil aneka pangan menuju swasembada/kemandirian pangan.
3. Pembentukan  ***Holding Company BUMN Pangan***  harus mampu meningkatkan efisiensi, kualitas produk pertanian/pangan, menjamin rantai pasokan/***supply chain***  pangan dan ketersediaan kebutuhan pangan dengan harga keekonomian yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani, serta menjamin ketersediaan dan harga yang tidak memberatkan konsumen, serta mengurangi ketergantungan pangan impor.
4. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian perlu mendorong dan memfasilitasi pertumbuhan agro industri yang mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri yang berbasis manajemen modern dan digital/***e.commercial*** .

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Holding Company*  BUMN, Konsep, Implementasi dan Benchmarking, Pranoto, Toto. “Lembaga Manajemen FEB. UI Jakarta, 2017
- Kementerian Pertanian, Dirjen Tanaman Pangan, 2020
- Biro Pusat Statistik. 2020